

## Edukasi Kebijakan Publik Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah

Nur Rois<sup>1\*</sup>, Ade Risna Sari<sup>2</sup>, Fadhil<sup>3</sup>, La Ode Marihi<sup>4</sup>, Harry Tuhumury<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Baturaja, Jl. Ratu Penghulu No. 2301, Karang Sari, Baturaja, Tj. Baru, Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32115


<sup>2</sup>Universitas Tanjungpura, Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124

<sup>3</sup>Universitas Syiah Kuala, Jl. Teuku Nyak Arief No.441, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh 23111

<sup>4,5</sup>Universitas Yapis Papua, Jl. Dr. Sam Ratulangi No.11, Trikora, Kec. Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua 99113

E-mail: [nurrois@unbara.ac.id](mailto:nurrois@unbara.ac.id)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6046>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 22 Maret 2026

Revised: 28 Maret 2026

Accepted: 9 April 2026

#### Kata Kunci

Kebijakan Publik,  
Kepercayaan Masyarakat,  
Pemerintah

#### Keywords

Public Policy, Public Trust,  
Government



### ABSTRACT

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, partisipasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui edukasi kebijakan publik. Metode pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi, diskusi interaktif, serta simulasi kebijakan yang dirancang untuk memperkuat literasi kebijakan publik secara konseptual dan aplikatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat terhadap konsep dan proses kebijakan publik. Selain itu, terbentuknya sikap kritis dan partisipatif dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Dampak lain yang cukup menonjol adalah meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, diikuti oleh terbentuknya pola komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan masyarakat. Di sisi lain, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan informasi kebijakan, serta memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan juga. Meskipun demikian, pelaksanaan program tidak terlepas dari berbagai tantangan, antara lain keberagaman tingkat pendidikan dan literasi masyarakat, keterbatasan waktu pelaksanaan, rendahnya kepercayaan awal terhadap program, serta keterbatasan akses terhadap informasi kebijakan yang transparan. Tantangan tersebut menjadi bahan evaluasi penting dalam upaya pengembangan program ke depan. Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih kritis, partisipatif, dan berdaya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan inklusif.

*This community service program aims to increase public understanding, participation, and trust in the government through public policy education. The implementation method is carried out through socialization, interactive discussions, and policy simulations designed to strengthen public policy literacy conceptually and applicatively. The results of the activity show a significant increase in public understanding of public policy concepts and processes. In addition, a critical and participatory attitude is formed in responding to government policies. Another quite prominent impact is the increase in the level of public trust in the government, followed by the formation of more effective communication patterns between the government and the community. On the other hand, this activity also succeeded in increasing the capacity of the community to access and utilize policy information, as well as strengthening collective awareness of the importance of transparency and accountability in governance as well. However, the implementation of the*

*program is not without various challenges, including the diversity of public education and literacy levels, limited implementation time, low initial trust in the program, and limited access to transparent policy information. These challenges become important evaluation materials in future program development efforts. Overall, this activity makes a significant contribution in encouraging the formation of a more critical, participatory, and empowered society in supporting transparent, accountable, and inclusive governance.*



This is an open access article under the CC–BY–SA license.

**How to Cite:** Nur Rois al et (2026). Edukasi Kebijakan Publik Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6046>

## PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Dalam kehidupan bernegara, hubungan antara pemerintah dan masyarakat merupakan fondasi utama bagi terciptanya stabilitas sosial, politik, dan ekonomi (Siswantoro, 2026). Relasi ini tidak hanya dibangun melalui kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah, tetapi juga melalui tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut (Iskandar, 2017). Dalam konteks ini, kepercayaan masyarakat menjadi elemen krusial yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Tanpa adanya kepercayaan, kebijakan yang dirancang secara baik sekalipun berpotensi mengalami resistensi atau bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya (Kristian, 2023).

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan pengalaman, persepsi, serta interaksi yang terjadi secara terus-menerus. Dalam banyak kasus, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat sering kali disebabkan oleh kurangnya transparansi, komunikasi yang tidak efektif, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap substansi kebijakan yang diterapkan (Sawir & Azhar Aljurida, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.

Dalam realitas sosial yang semakin kompleks, kebijakan publik tidak lagi dapat dipahami sebagai produk administratif semata, melainkan sebagai instrumen yang harus mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas (Akmal Priambodo et al., 2025). Namun demikian, kompleksitas kebijakan sering kali membuat masyarakat kesulitan untuk memahami tujuan, mekanisme, serta dampak yang ditimbulkan. Akibatnya, muncul berbagai persepsi negatif yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah (Rian Andhika, 2018).

Fenomena tersebut menunjukkan pentingnya upaya sistematis untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap kebijakan publik. Edukasi kebijakan publik menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam menjembatani kesenjangan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat. Melalui edukasi, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga mampu mengembangkan pemahaman kritis terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Edukasi kebijakan publik juga berperan dalam membentuk kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam proses pemerintahan (Rikardus et al., 2026). Ketika masyarakat memahami bagaimana kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi, mereka cenderung memiliki rasa memiliki terhadap kebijakan tersebut (Y. Gede Sutmasa, 2026). Hal ini pada akhirnya dapat memperkuat legitimasi pemerintah di mata publik.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses informasi (Faidlatul Habibah & Irwansyah, 2021). Namun, kemudahan akses ini tidak selalu diiringi dengan kemampuan untuk memilah informasi yang akurat dan relevan (Rantika Gumay et al., 2025). Banyaknya informasi yang beredar, termasuk yang bersifat tidak valid atau menyesatkan, justru dapat memperburuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (Hidayat et al., 2023). Oleh karena itu, edukasi kebijakan publik juga perlu diarahkan untuk meningkatkan kemampuan literasi informasi masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, tantangan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih menjadi isu yang signifikan (Irhamdhika et al., 2025). Berbagai dinamika sosial dan politik yang terjadi menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat cenderung fluktuatif, tergantung pada bagaimana pemerintah merespons isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat

(Dharmawan et al., 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Salah satu faktor yang berpengaruh adalah komunikasi kebijakan yang kurang efektif. Pemerintah sering kali menggunakan bahasa teknokratis yang sulit dipahami oleh masyarakat umum, sehingga pesan yang ingin disampaikan tidak tersampaikan secara optimal (Silalahi Ulber, 2021). Akibatnya, muncul interpretasi yang beragam, yang tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman (Christy Maria, 2023). Dalam kondisi seperti ini, edukasi kebijakan publik menjadi penting sebagai sarana untuk menyederhanakan dan menjelaskan kebijakan secara lebih komunikatif.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan juga masih relatif terbatas. Meskipun terdapat berbagai mekanisme partisipasi publik, seperti musyawarah perencanaan pembangunan, namun dalam praktiknya belum semua lapisan masyarakat dapat terlibat secara aktif (Sokoy et al., 2025). Keterbatasan ini berpotensi menimbulkan kesan bahwa kebijakan dibuat tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan (Samsiah Nelly, 2024).

Edukasi kebijakan publik dapat menjadi solusi untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas. Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat akan lebih percaya diri untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi yang meningkat tidak hanya memperkaya substansi kebijakan, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Jatnika et al., 2024).

Edukasi kebijakan publik juga memiliki dimensi pemberdayaan. Masyarakat yang teredukasi akan memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah secara konstruktif. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat bukan semata-mata sebagai bentuk kritik, tetapi juga sebagai kontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Herlinda et al., 2025).

Dalam perspektif administrasi publik, kepercayaan masyarakat sering kali dikaitkan dengan konsep *good governance*, yang menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas (Anggraini, 2025). Edukasi kebijakan publik dapat menjadi instrumen untuk menginternalisasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan tidak hanya dibangun dari sisi pemerintah, tetapi juga dari kesadaran masyarakat itu sendiri.

Pentingnya edukasi kebijakan publik juga semakin relevan di era demokrasi modern, di mana masyarakat memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan. Demokrasi tidak hanya menuntut adanya kebebasan, tetapi juga tanggung jawab dalam memahami dan menyikapi kebijakan yang ada (Ulfyyati et al., 2023). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, peran berbagai pihak menjadi sangat penting. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Diperlukan kolaborasi dengan akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga pendidikan untuk menciptakan ekosistem edukasi yang efektif. Sinergi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi serta meningkatkan kualitas penyampaian informasi.

Selain itu, metode edukasi yang digunakan juga perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat. Pendekatan yang bersifat partisipatif dan kontekstual akan lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat satu arah (Nuryana et al., 2025). Edukasi yang melibatkan dialog dan interaksi akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pandangannya.

Dalam jangka panjang, edukasi kebijakan publik diharapkan dapat membentuk budaya politik yang lebih matang. Masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif dalam proses pemerintahan (Indriani et al., 2025). Budaya ini akan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat, yang didasarkan pada saling pengertian dan kepercayaan (Wahyuni & Sudirman, 2026).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa edukasi kebijakan publik memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Edukasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses pembelajaran yang membentuk cara pandang dan sikap masyarakat terhadap kebijakan publik.

Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan program edukasi kebijakan publik perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terencana. Program tersebut harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik masyarakat, serta didukung oleh sumber daya yang memadai. Dengan

pendekatan yang tepat, edukasi kebijakan publik dapat menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat yang kuat dan berkelanjutan terhadap pemerintah.

Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi keberhasilan pembangunan. Tanpa kepercayaan, berbagai upaya pembangunan akan menghadapi hambatan yang signifikan. Sebaliknya, dengan kepercayaan yang tinggi, masyarakat akan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Dalam konteks inilah, edukasi kebijakan publik menjadi relevan sebagai upaya untuk memperkuat fondasi hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

## **METODE**

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini dirancang secara sistematis dengan mengedepankan pendekatan partisipatif, komunikatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Perancangan metode ini tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga membangun pemahaman kritis serta memperkuat hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan disusun melalui beberapa tahapan yang saling terintegrasi, dimulai dari tahap persiapan hingga evaluasi

### **Tahap Identifikasi Permasalahan dan Analisis Kebutuhan Masyarakat**

Tahap awal dalam pelaksanaan program ini diawali dengan proses identifikasi permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Proses ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai persepsi, pengalaman, serta ekspektasi masyarakat terhadap kebijakan publik. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*), serta observasi lapangan. Analisis kebutuhan kemudian dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan pemahaman masyarakat terkait kebijakan publik, termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dengan demikian, tahap ini tidak hanya berfungsi sebagai fondasi konseptual, tetapi juga sebagai dasar dalam merancang intervensi edukatif yang relevan dan kontekstual.

### **Tahap Perancangan Materi Edukasi Kebijakan Publik**

Setelah kebutuhan masyarakat terpetakan secara sistematis, langkah selanjutnya adalah menyusun materi edukasi yang dirancang secara terstruktur dan berbasis pada prinsip-prinsip komunikasi publik yang efektif. Materi yang dikembangkan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif dan persuasif, dengan tujuan membangun pemahaman yang utuh mengenai proses perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan publik. Penyusunan materi dilakukan dengan memperhatikan tingkat literasi masyarakat, sehingga bahasa yang digunakan tetap akademik namun komunikatif dan mudah dipahami. Selain itu, materi juga mencakup studi kasus nyata, ilustrasi kebijakan, serta contoh praktik baik (*best practices*) yang dapat meningkatkan daya tarik sekaligus relevansi pembelajaran. Pada tahap ini juga dilakukan validasi materi oleh ahli atau praktisi di bidang kebijakan publik guna memastikan kualitas dan akurasi informasi.

### **Tahap Sosialisasi dan Penyampaian Edukasi**

Tahap implementasi program diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan penyampaian edukasi kepada masyarakat. Metode yang digunakan bersifat interaktif dan dialogis, seperti seminar, lokakarya, diskusi publik, serta penyuluhan berbasis komunitas. Pendekatan ini dipilih untuk menciptakan ruang komunikasi dua arah antara fasilitator dan masyarakat, sehingga terjadi proses pertukaran pengetahuan yang dinamis. Dalam pelaksanaannya, fasilitator tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mediator yang menjembatani pemahaman antara konsep kebijakan publik dengan realitas yang dihadapi masyarakat. Penggunaan media pendukung seperti infografis, video edukatif, dan simulasi kebijakan juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan efektivitas penyampaian materi. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami kebijakan secara normatif, tetapi juga mampu mengkritisi dan berpartisipasi secara konstruktif.

### **Tahap Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Masyarakat**

Edukasi yang efektif tidak berhenti pada penyampaian informasi, melainkan perlu diikuti dengan proses pendampingan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tahap ini difokuskan pada upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami, menilai, dan terlibat dalam kebijakan publik. Pendampingan dilakukan melalui kegiatan konsultasi, klinik kebijakan, serta forum diskusi rutin yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh klarifikasi atas berbagai isu kebijakan. Dalam konteks ini, masyarakat didorong untuk menjadi subjek aktif yang tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Pendampingan ini juga berfungsi untuk membangun kepercayaan secara bertahap melalui interaksi yang intensif dan transparan antara masyarakat dan pihak penyelenggara program.

### **Tahap Evaluasi dan Refleksi Program**

Evaluasi merupakan tahap krusial untuk menilai efektivitas pelaksanaan program edukasi kebijakan publik. Evaluasi dilakukan secara komprehensif dengan mengukur perubahan tingkat pemahaman, sikap, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Instrumen evaluasi dapat berupa kuesioner, wawancara lanjutan, serta analisis partisipasi masyarakat dalam kegiatan publik. Selain itu, dilakukan pula refleksi bersama antara tim pelaksana dan peserta untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan program. Hasil evaluasi ini kemudian dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan program di masa mendatang, sehingga keberlanjutan dan dampak jangka panjang dapat terjamin.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil kegiatan dalam pengabdian ini menunjukkan capaian yang bersifat multidimensional, baik pada aspek kognitif, afektif, maupun partisipatif masyarakat. Secara umum, hasil kegiatan dapat diuraikan ke dalam beberapa aspek utama yang saling berkaitan.

### **Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Konsep dan Proses Kebijakan Publik**

Salah satu hasil yang paling menonjol dari pelaksanaan program edukasi ini tercermin pada terjadinya peningkatan kapasitas kognitif masyarakat dalam memahami hakikat kebijakan publik secara lebih komprehensif dan mendalam. Peningkatan tersebut tidak hanya terbatas pada penguasaan definisi konseptual, melainkan juga mencakup pemahaman yang lebih utuh terhadap tahapan-tahapan krusial dalam siklus kebijakan, mulai dari proses perumusan agenda, penyusunan kebijakan, implementasi, hingga tahap evaluasi dan umpan balik kebijakan. Kondisi awal sebelum program dilaksanakan menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat untuk memposisikan kebijakan publik sebagai produk yang bersifat statis, final, dan sepenuhnya berada di luar jangkauan intervensi masyarakat. Perspektif ini secara tidak langsung mencerminkan adanya kesenjangan literasi kebijakan yang berdampak pada rendahnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.

Namun demikian, melalui pendekatan edukasi yang dirancang secara sistematis, partisipatif, dan berbasis interaksi dua arah, terjadi transformasi paradigma yang cukup signifikan dalam cara pandang masyarakat. Proses pembelajaran yang tidak hanya bersifat satu arah, melainkan melibatkan diskusi, refleksi kritis, serta pertukaran pengalaman, telah mendorong masyarakat untuk memahami bahwa kebijakan publik pada dasarnya merupakan hasil dari proses sosial-politik yang dinamis. Proses tersebut melibatkan beragam aktor, baik dari unsur pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil, yang masing-masing membawa kepentingan, nilai, dan preferensi yang berbeda-beda. Dengan demikian, kebijakan publik tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang kaku dan tertutup, melainkan sebagai produk yang adaptif dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat.

Peningkatan pemahaman ini tidak berhenti pada tataran teoritis semata, melainkan juga terinternalisasi dalam bentuk kemampuan aplikatif yang lebih nyata. Hal ini dimungkinkan melalui penyediaan contoh-contoh empiris serta simulasi sederhana yang dirancang untuk merepresentasikan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh gambaran abstrak mengenai proses kebijakan, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan konteks lokal yang mereka alami secara langsung. Simulasi yang dilakukan, misalnya, memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan sebagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga mereka dapat memahami dinamika negosiasi, kompromi, serta pertimbangan rasional yang mendasari lahirnya suatu kebijakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan edukasi ini tidak hanya berhasil meningkatkan literasi kebijakan publik secara konseptual, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran kritis dan partisipatif dalam diri masyarakat. Transformasi ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya hubungan yang lebih konstruktif antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus membuka peluang bagi meningkatnya kualitas partisipasi publik dalam proses pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### **Terbangunnya Sikap Kritis dan Partisipatif dalam Menyikapi Kebijakan Pemerintah**

Hasil kegiatan juga menunjukkan adanya transformasi yang cukup berarti pada dimensi afektif dan perilaku masyarakat, khususnya dalam hal penguatan sikap kritis dan peningkatan partisipasi dalam merespons berbagai kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Sikap kritis yang berkembang dalam konteks ini tidak dimaknai sebagai bentuk resistensi atau penolakan tanpa dasar, melainkan sebagai kapasitas reflektif masyarakat untuk melakukan penilaian secara rasional, argumentatif, dan berbasis informasi yang relevan. Perubahan ini mengindikasikan adanya pergeseran orientasi masyarakat dari posisi penerima pasif menjadi aktor yang memiliki kesadaran evaluatif terhadap substansi maupun implikasi kebijakan publik.

Proses pembentukan sikap tersebut tidak terlepas dari strategi pembelajaran yang menekankan pada pendekatan dialogis dan partisipatif. Melalui penyelenggaraan forum diskusi, lokakarya interaktif, serta dialog publik yang dirancang secara inklusif, masyarakat diberikan ruang yang memadai untuk mengekspresikan pandangan, menyampaikan aspirasi, serta mengajukan pertanyaan secara terbuka namun tetap konstruktif. Dinamika interaksi yang terbangun dalam forum-forum tersebut secara tidak langsung mendorong terbentuknya budaya deliberasi yang sehat, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam proses pertukaran gagasan.

Keberadaan ruang deliberatif ini berperan penting dalam menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses kebijakan. Masyarakat tidak lagi memosisikan diri sebagai objek dari kebijakan, melainkan mulai memandang dirinya sebagai subjek yang memiliki hak sekaligus kapasitas untuk memengaruhi arah kebijakan melalui partisipasi yang bertanggung jawab. Hal ini tercermin dari meningkatnya keberanian masyarakat dalam menyampaikan kritik yang bersifat solutif, memberikan rekomendasi berbasis pengalaman lokal, serta melakukan kontrol sosial terhadap implementasi kebijakan di lingkungan mereka.

Dengan demikian, capaian kegiatan ini tidak hanya terbatas pada peningkatan aspek kognitif berupa pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga mencakup pembentukan disposisi kewargaan yang lebih matang. Masyarakat mulai menunjukkan karakter sebagai warga negara yang sadar akan posisi strategisnya dalam sistem demokrasi, termasuk dalam menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Transformasi ini menjadi indikator penting bahwa proses edukasi yang dilakukan telah berhasil menumbuhkan kesadaran kritis, memperkuat partisipasi publik, serta mendukung terciptanya praktik demokrasi yang lebih substantif dan inklusif dalam kehidupan bermasyarakat.

### **Meningkatnya Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah**

Salah satu indikator capaian yang paling penting dalam pelaksanaan kegiatan ini tercermin pada meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Peningkatan tersebut tidak muncul secara instan, melainkan merupakan hasil dari proses pembelajaran sosial yang berlangsung secara bertahap, seiring dengan bertambahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme, prosedur, serta dinamika dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Di samping itu, terbukanya ruang komunikasi yang lebih intensif dan setara antara pemerintah dan masyarakat turut menjadi faktor determinan dalam membangun kembali relasi kepercayaan yang sebelumnya mengalami erosi.

Pada kondisi awal, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat cenderung dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap informasi yang akurat, terjadinya miskomunikasi antara pemangku kebijakan dan masyarakat, serta berkembangnya persepsi negatif terkait aspek transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Situasi tersebut memperkuat jarak psikologis antara masyarakat dan pemerintah, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya partisipasi publik serta munculnya sikap skeptis terhadap setiap kebijakan yang dihasilkan. Ketidakpercayaan ini bukan semata-mata bersumber dari penolakan rasional, melainkan juga dari minimnya pengalaman interaksi yang konstruktif antara kedua belah pihak.

Melalui implementasi kegiatan edukasi yang menitikberatkan pada prinsip keterbukaan informasi, partisipasi inklusif, serta dialog yang bersifat dua arah, terjadi pergeseran persepsi yang cukup signifikan dalam cara masyarakat memandang pemerintah. Masyarakat mulai memperoleh akses yang lebih luas terhadap informasi kebijakan, memahami rasionalitas di balik pengambilan keputusan, serta memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses diskusi yang relevan dengan kepentingan mereka. Interaksi yang terbangun dalam forum-forum tersebut secara tidak langsung memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat, karena adanya upaya nyata untuk mendengar, mempertimbangkan, dan merespons aspirasi publik.

Kepercayaan yang terbentuk dalam konteks ini tidak bersifat superfisial atau semu, melainkan berakar pada pengalaman empiris masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah secara langsung. Masyarakat mulai memandang pemerintah tidak hanya sebagai entitas yang memiliki otoritas formal, tetapi juga sebagai institusi yang mengemban tanggung jawab moral dan sosial untuk melibatkan publik dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Dengan demikian, hubungan antara masyarakat dan pemerintah mengalami transformasi menuju pola relasi yang lebih dialogis, transparan, dan kolaboratif.

Secara keseluruhan, peningkatan kepercayaan masyarakat ini menjadi fondasi yang sangat penting bagi keberlanjutan praktik tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kepercayaan yang didasarkan pada pemahaman yang memadai dan pengalaman partisipatif yang nyata akan mendorong terciptanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung proses pembangunan yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

### **Terwujudnya Pola Komunikasi yang Lebih Efektif antara Pemerintah dan Masyarakat**

Pelaksanaan kegiatan ini turut menghasilkan transformasi yang signifikan dalam pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, yang sebelumnya cenderung bersifat linear dan satu arah, menjadi lebih terbuka, dialogis, serta konstruktif. Pada fase awal, komunikasi yang terbangun lebih menempatkan pemerintah sebagai aktor dominan dalam penyampaian informasi, sementara masyarakat berada pada posisi pasif sebagai penerima pesan tanpa ruang yang memadai untuk memberikan respons atau umpan balik. Pola komunikasi semacam ini tidak hanya membatasi aliran informasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesenjangan pemahaman serta memperkuat jarak relasional antara pemerintah dan masyarakat.

Melalui implementasi pendekatan edukatif yang dirancang secara partisipatif, terjadi pergeseran mendasar dalam mekanisme komunikasi yang terbangun. Pendekatan ini menekankan pentingnya interaksi dua arah yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, gagasan, serta perspektif secara lebih seimbang. Dalam konteks ini, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek komunikasi, melainkan sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan aspirasi, mengemukakan pandangan, serta berpartisipasi aktif dalam proses diskursus publik.

Forum-forum diskusi, dialog publik, serta kegiatan interaktif lainnya yang difasilitasi dalam program ini berfungsi sebagai ruang deliberatif yang inklusif. Ruang tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan mereka secara langsung kepada pihak pemerintah, sekaligus memperoleh klarifikasi dan penjelasan yang lebih komprehensif terkait kebijakan yang diambil. Interaksi yang berlangsung dalam forum tersebut tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga membangun pemahaman bersama (*mutual understanding*) yang menjadi landasan penting dalam menciptakan komunikasi yang efektif.

Perubahan pola komunikasi ini memberikan implikasi yang luas, tidak hanya pada peningkatan kualitas dan akurasi informasi yang diterima masyarakat, tetapi juga pada penguatan hubungan sosial antara pemerintah dan warga. Relasi yang sebelumnya bersifat hierarkis dan formalistik secara bertahap berkembang menjadi hubungan yang lebih egaliter dan kolaboratif. Dalam kerangka ini, pemerintah dan masyarakat mulai dipandang sebagai mitra yang memiliki peran strategis dalam proses pembangunan, di mana keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada sinergi dan komunikasi yang efektif di antara keduanya.

### **Meningkatnya Kapasitas Masyarakat dalam Mengakses dan Memanfaatkan Informasi Kebijakan**

Capaian lain yang memiliki signifikansi tinggi dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengakses, memahami, serta memanfaatkan informasi yang

berkaitan dengan kebijakan publik secara lebih efektif dan bertanggung jawab. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya merefleksikan bertambahnya kemampuan teknis dalam memperoleh informasi, tetapi juga menunjukkan adanya perkembangan dalam literasi informasi yang mencakup aspek analitis, kritis, dan reflektif. Dalam konteks masyarakat yang semakin diwarnai oleh arus informasi yang masif, kemampuan tersebut menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak terjebak dalam distorsi informasi, termasuk hoaks dan disinformasi yang berpotensi menyesatkan persepsi publik.

Sebelum kegiatan edukasi dilaksanakan, sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan dalam mengidentifikasi sumber informasi yang kredibel, memahami substansi dokumen kebijakan, serta membedakan antara informasi yang faktual dan yang bersifat manipulatif. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan literasi yang berimplikasi pada kerentanan masyarakat terhadap penyebaran informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, program edukasi dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui pendekatan yang sistematis dan aplikatif.

Melalui kegiatan edukasi, masyarakat diperkenalkan pada berbagai sumber informasi resmi yang dapat diakses secara terbuka, termasuk portal pemerintah, dokumen kebijakan, serta media komunikasi publik yang memiliki legitimasi. Selain itu, peserta juga dibekali dengan kemampuan dasar dalam membaca dan menafsirkan dokumen kebijakan, seperti memahami struktur, bahasa normatif, serta maksud yang terkandung di dalamnya. Tidak kalah penting, kegiatan ini juga memberikan pemahaman mengenai teknik sederhana dalam melakukan verifikasi informasi, seperti melakukan pengecekan silang terhadap sumber, menelusuri keabsahan data, serta mengidentifikasi indikator-indikator informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Implikasi dari peningkatan kapasitas tersebut terlihat pada tumbuhnya kemandirian masyarakat dalam memperoleh dan mengelola informasi. Masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada interpretasi pihak lain, melainkan mulai mengembangkan kemampuan untuk menilai informasi secara mandiri dan objektif. Hal ini pada gilirannya berkontribusi terhadap terbentuknya pola pikir yang lebih rasional, argumentatif, dan berbasis data dalam menilai berbagai kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah.

Dengan demikian, peningkatan literasi informasi ini tidak hanya memperkuat posisi masyarakat sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai aktor yang mampu mengelola dan memanfaatkan informasi secara produktif dalam kehidupan demokratis. Kapasitas ini menjadi fondasi penting dalam mendorong terciptanya masyarakat yang cerdas secara informasi (*informed society*), yang tidak hanya responsif terhadap kebijakan, tetapi juga mampu berpartisipasi secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan publik.

### **Terciptanya Kesadaran Kolektif akan Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah**

Hasil pelaksanaan kegiatan ini juga memperlihatkan adanya penguatan kesadaran kolektif masyarakat terkait urgensi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kesadaran tersebut tidak lagi berada pada tataran konseptual yang bersifat abstrak, melainkan telah mengalami proses internalisasi menjadi nilai yang dipandang relevan dan mendesak untuk diwujudkan dalam praktik tata kelola pemerintahan sehari-hari. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi masyarakat dari sekadar memahami konsep menuju kemampuan untuk mengaitkannya dengan realitas empiris yang mereka hadapi dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebelum intervensi program dilakukan, pemahaman masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas cenderung terbatas pada definisi normatif tanpa diikuti oleh kesadaran akan implikasi praktisnya. Namun, melalui pendekatan edukatif yang menekankan pada pemberian contoh konkret, diskusi kontekstual, serta refleksi kritis, masyarakat mulai menyadari bahwa kedua prinsip tersebut merupakan prasyarat fundamental dalam mewujudkan pemerintahan yang kredibel dan berorientasi pada kepentingan publik. Transparansi dipahami sebagai keterbukaan dalam penyediaan informasi yang dapat diakses secara luas, sementara akuntabilitas dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil.

Kesadaran yang semakin menguat ini berimplikasi langsung pada meningkatnya peran aktif masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan sosial (*social control*). Masyarakat mulai menunjukkan keberanian untuk mengajukan pertanyaan, meminta klarifikasi, serta menuntut keterbukaan informasi sebagai bagian dari hak mereka sebagai warga negara. Partisipasi dalam bentuk pengawasan ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga berkembang menjadi upaya proaktif untuk

memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Di sisi lain, dinamika tersebut turut mendorong pemerintah untuk menyesuaikan pola responsnya terhadap masyarakat. Pemerintah menjadi lebih terbuka dalam menyampaikan informasi, lebih responsif terhadap aspirasi publik, serta lebih berhati-hati dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pengambilan keputusan. Interaksi yang terbangun antara masyarakat dan pemerintah pun mengalami pergeseran menuju hubungan yang lebih seimbang, di mana kedua pihak saling berperan sebagai mitra yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

### **Tantangan Dalam Edukasi Kebijakan Publik**

Pelaksanaan program ini tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian untuk pengembangan ke depan. Berikut beberapa tantangan tersebut, yaitu:

#### **1. Keberagaman Tingkat Pendidikan dan Literasi Masyarakat**

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program ini terletak pada keberagaman latar belakang pendidikan dan tingkat literasi peserta. Variasi tersebut memengaruhi kemampuan individu dalam menerima dan memahami materi yang disampaikan. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan pedagogis yang adaptif, di mana fasilitator tidak hanya menyampaikan informasi secara linear, tetapi juga menyesuaikan metode komunikasi dengan karakteristik audiens. Dalam praktiknya, hal ini sering kali mengharuskan fasilitator untuk mengulang materi, menyederhanakan konsep, serta menggunakan contoh kontekstual agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

#### **2. Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Program**

Tantangan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan durasi kegiatan yang berdampak pada efektivitas proses edukasi. Edukasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan proses yang membutuhkan waktu relatif panjang untuk mencapai perubahan kognitif maupun afektif yang mendalam. Namun demikian, keterbatasan waktu pelaksanaan sering kali membatasi intensitas interaksi antara fasilitator dan peserta. Akibatnya, proses internalisasi nilai dan pemahaman terhadap materi belum berlangsung secara optimal, khususnya bagi peserta yang memerlukan pendampingan berkelanjutan dan pendekatan yang lebih intensif.

#### **3. Rendahnya Kepercayaan Awal Masyarakat terhadap Program**

Dalam tahap awal implementasi, ditemukan adanya sikap apatis dan kurangnya antusiasme dari sebagian masyarakat terhadap program yang dijalankan. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari pengalaman sebelumnya, di mana program serupa dinilai kurang berkelanjutan atau tidak memberikan dampak nyata. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam membangun kepercayaan awal (initial trust). Oleh karena itu, diperlukan strategi pendekatan yang lebih persuasif dan partisipatif, termasuk dengan melibatkan tokoh masyarakat sebagai agen legitimasi sosial yang dapat menjembatani komunikasi antara penyelenggara program dan warga.

#### **4. Keterbatasan Akses Informasi dan Transparansi Pemerintah**

Tantangan lain yang turut memengaruhi efektivitas program adalah terbatasnya akses terhadap informasi kebijakan yang bersifat terbuka dan transparan. Dalam beberapa kasus, kurangnya ketersediaan data yang komprehensif dari pihak pemerintah menjadi hambatan dalam menyampaikan materi secara utuh dan mendalam. Hal ini berimplikasi pada terbatasnya ruang diskusi kritis yang berbasis data. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari institusi pemerintah untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian integral dari upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program edukasi kebijakan publik memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hubungan antara masyarakat dan pemerintah melalui penguatan aspek kognitif, afektif, dan partisipatif masyarakat. Dari sisi kognitif, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap konsep serta proses kebijakan publik secara lebih komprehensif, sehingga

masyarakat tidak lagi memandang kebijakan sebagai produk yang statis, melainkan sebagai proses dinamis yang terbuka terhadap partisipasi publik.

Pada dimensi sikap dan perilaku, program ini mampu mendorong terbentuknya karakter masyarakat yang lebih kritis dan partisipatif dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Masyarakat mulai menunjukkan kemampuan untuk menilai kebijakan secara rasional, menyampaikan aspirasi secara konstruktif, serta terlibat aktif dalam ruang-ruang deliberatif yang tersedia. Transformasi ini memperlihatkan adanya pergeseran peran masyarakat dari objek kebijakan menjadi subjek yang memiliki posisi strategis dalam proses demokrasi.

Selain itu, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi capaian yang paling penting yang dihasilkan dari program ini. Kepercayaan tersebut terbentuk secara bertahap melalui keterbukaan informasi, komunikasi yang lebih dialogis, serta pengalaman interaksi langsung yang konstruktif antara masyarakat dan pemerintah. Kondisi ini turut didukung oleh terbangunnya pola komunikasi yang lebih efektif, yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan pemahaman secara lebih seimbang dan transparan.

Di sisi lain, program ini juga berhasil meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan informasi kebijakan secara lebih kritis dan mandiri. Hal ini berkontribusi pada terbentuknya masyarakat yang lebih rasional dan berbasis data dalam menilai kebijakan publik, sekaligus memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kesadaran tersebut mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan sosial serta memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun demikian, pelaksanaan program masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti heterogenitas tingkat pendidikan masyarakat, keterbatasan waktu pelaksanaan, rendahnya kepercayaan awal terhadap program, serta keterbatasan akses informasi dari pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan kolaboratif agar program edukasi kebijakan publik di masa mendatang dapat memberikan dampak yang lebih optimal. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan literasi kebijakan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat kualitas demokrasi secara berkelanjutan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelenggaraan kegiatan pengabdian ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa dukungan, kerja sama, dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kelancaran kegiatan ini. Pertama, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak pemerintah daerah serta aparat terkait yang telah memberikan izin, dukungan logistik, serta akses informasi yang sangat diperlukan selama pelaksanaan program. Penulis juga menyampaikan penghargaan kepada tokoh masyarakat, pemuka komunitas, dan seluruh warga masyarakat yang telah bersedia berpartisipasi aktif dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari forum diskusi, lokakarya interaktif, hingga simulasi kebijakan. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada seluruh tim pengabdian yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan kegiatan edukasi. Penulis berharap bahwa kolaborasi, dukungan, dan partisipasi yang telah terjalin melalui kegiatan ini dapat terus berlanjut, sehingga tercipta sinergi yang berkelanjutan antara masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

## REFERENSI

- Akmal Priambodo, Husein Satria, Agestanio Yoniv Andana, Siti Arikah Nur Azizah, Muhammad Abrar Dwicofanny, & Bagas Setyo Anggoro. (2025). Kebijakan Publik dan Politik Hukum dalam Administrasi Pemerintahan. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(2), 58–66. <https://doi.org/10.65310/ycaf4b83>
- Anggraini, N. L., & Hasan, A. (2025). Analisis Hubungan Prinsip Good Governance Terhadap Peningkatan Kinerja Staf Kelurahan Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(10), 407–412. <https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v1i10.701>
- Christy Maria, A. (2023). Peran Persepsi dan Interpretasi dalam Efektivitas Komunikasi. *Academia.Edu*.
- Dharmawan, R. A., Setyawan, K. G., Setiawan, A., & Imron, A. (2025). Pengaruh Dinamika Politik

- Terhadap Kepercayaan Publik Pada Pemilu Di Indonesia (Studi Kasus Pemilu 2024 Pada Pemilih. *Dialektika*, 5(1), 52–68.
- Faidlatul Habibah, A., & Irwansyah, I. (2021). Era Masyarakat Informasi sebagai Dampak Media Baru. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(2), 350–363. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i2.255>
- Herlinda, E., Hasibuan, P. M., Sembiring, R., Afrita, A., & Aflah, A. (2025). Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Pemerintahan sebagai Upaya Pencegahan Korupsi. *Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, 5(4), 231–240. <https://doi.org/10.29303/darmadiksani.v5i4.9099>
- Hidayat, R., Imran, & Ramadhan, R. (2023). Peran Media Sosial Dalam Mengkonstruksi Opini Publik Terkait Kebijakan Pemerintah: Studi Kasus Wacana Publik Tahun 2025. *CORE: Journal of Communication Research*, 3(2), 64–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.47650/core.v3i2.2223>
- Indriani, U., Najmi Zura, N., Ayu Silmyani, S., Dwi Putra, R., Radja Ramadhani, M., & Waukateyau, Y. (2025). Dinamika Hubungan Sosial dan Budaya Dalam Implementasi Kebijakan Publik di Kota Padang. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(5), 3031–5220. <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v3i5.1824>
- Irhamdhika, G., El Hidayah, N. I., Yogi Ariska, Dito Anjasmoro Ningtyas, & Sari, A. (2025). Krisis Kepercayaan Publik: Fenomena #Kaburajadulu Dan Peran Humas Pemerintah Dalam Merespons Cancel Culture. *Jurnal Public Relations (J-PR)*, 6(1), 7–15. <https://doi.org/10.31294/jpr.v6i1.8663>
- Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya Partisipasi dan Peranan Kelembagaan Politik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 17–35. <https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.2>
- Jatnika, D. C., Humaedi, S., & Puti Firsanty, F. (2024). Program Pemerintah Dan Dinamika Partisipasi Masyarakat Untuk Optimalisasi Keberfungsian Sosial. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(2), 237–249. <https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.60625>
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.155>
- Nuryana, R. S., Jatnika, D. C., & Firsanty, F. P. (2025). Efektivitas Sosialisasi Sebagai Pendekatan Partisipatif Dalam Program Sosial: Tinjauan Sistematis Literatur. *Social Work Journal*, 15(1), 35–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/share.v15i1.63487>
- Rantika Gumay, Maulia Karlina, Muhammad Farlyan, Muhammad Nabil Suhari, Eva Iryani, & Helty Asafri. (2025). Strategi Penelusuran Informasi Efektif Era Digital: Studi Pada Mahasiswa Generasi Z. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(5), 7294–7303. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i5.10253>
- Rian Andhika, L. (2018). Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan (JIP)*, 3(1), 24–42. <https://doi.org/10.24905/jip.3.1.2018.24-42>
- Rikardus, E., Pecamuya, R., Katayu, D., & Hombore, E. (2026). *Penguatan Kapasitas Komunitas Adat dalam Hak Kepemilikan Tanah dan Tata Kelola Publik melalui Advokasi Edukasi*. *AKSI KITA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 338–347. <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/h9smce58>
- Samsiah Nelly. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik. *Jurnal Sociopolitico*, 6(1), 86–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v6i1.119>
- Sawir, M., & Azhar Aljurida, A. (2025). Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Daerah. *Journal of Public Policy*, 1(1), 2025–2026. <https://jurnal.ppsuniyap.ac.id/index.php/jpp>
- Silalahi Ulber. (2021). Komunikasi Pemerintahan: Mengirim Dan Menerima Informasi Tugas Dan Informasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 36–54.
- Siswanto, M. I. (2026). *Hubungan negara dan warga negara dalam sistem demokrasi indonesia*. *Jurnal Pendidikan Dewantara*, 12(1), 122–135. <https://doi.org/10.55933/jpd.v12i1.1161>
- Sokoy, M., Aneta, Y., & Nani, Y. N. (2025). Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di Kelurahan Dembe Jaya. *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(1), 577–584. <https://doi.org/10.54923/researchreview.v4i1.193>
- Ulfyyati, A., Muhamad, R., Barri, M. fathur, & Akbari, I. S. (2023). Demokrasi: Tinjauan Terhadap

Konsep, Tantangan, dan Prospek Masa Depan. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 435–444. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.48>

Wahyuni, S., & Sudirman, R. (2026). *Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik : Memperkuat Demokrasi dan Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah*. *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 4(4), 2196–2206. <https://doi.org/10.56113/takuana.v4i4.433>

Y. Gede Sutmasa. (2026). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/v37nrw32>